



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Chaerul Cholik bin Umar Sa'in, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Sekolah, tempat tinggal di Link. Sawah RT.05 RW. 04, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Syamsiyah binti Lamri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Link. Sawah RT.05 RW. 04, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 57/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran (Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/22/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

Putusan No. 57/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 10



- a. Ibnu Al Farabi Septiawan (lk) umur 13 tahun,
- b. Lailatul Hasanah (pr) umur 11 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2011 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan, antara lain Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, kemudian pisah tempat;
5. Bahwa selama perpisahan tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon masih memberikan nafkah lahir, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 215/22/X/1997 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pabuaran, tertanggal 13 Oktober 1997, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Asrap bin Rehudin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Sawah RT. 05 RW. 04, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga mereka;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 13 Oktober 1997 dan dari



pernikahannya telah dikaruniai anak dua orang;

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Desember 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Lukman;
- Bahwa saat ini sekitar sejak sekitar bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Darmawan bin Iskandar, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Sawah RT. 05 RW. 04, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 13 Oktober 1997 dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Desember 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Lukman;
- Bahwa saat ini sekitar sejak sekitar bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara



ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 57/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon? Dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak



melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 57/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa bukti P.1. oleh karena bukti tersebut autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Oktober 1997 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 215/22/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997



telah dikarunia 2 anak bernama :

- a. Ibnu Al Farabi Septiawan (lk) umur 13 tahun,
 - b. Lailatul Hasanah (pr) umur 11 tahun;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2011 sudah tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 3. Sejak sekitar bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Termohon meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Pemohon, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, berarti terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata-nyata sudah pecah, serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, sehingga



Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Chaerul Cholik bin Umar Sa'in) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Syamsiyah binti Lamri) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dan
KUA Kecamatan Pabuaran;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu
ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari ini, Senin tanggal 20 Februari 2012
Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433
Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH. Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah,
S.Ag, MH. dan Tuti Sudiarti, S.H, MH masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, SH
sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya
Termohon. -

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

Tuti Sudiarti, S.H, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000
4. Redaksi	Rp. 5.000, -
5. Materai	Rp. 6.000, -
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Putusan No. 57/Pdt.G/2011/PA.Clg

Halaman 9 dari 10



DISALIN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

Drs. H. Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)